

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan sosial, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta senantiasa memperhatikan tantangan persaingan global. Salah satu bidang pembangunan yang penting dan urgen adalah pembangunan dibidang ekonomi, khususnya ekonomi perbankan.

Keberadaan perbankan dalam sistem pembangunan ekonomi nasional memiliki peranan yang sangat penting, utamanya terkait kebijakan moneter Negara. Perkembangan dunia perbankan nasional ditandai dengan munculnya konsep perbankan nasional secara menyeluruh dan integral. Menjamurnya praktik perbankan syariah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari perkembangan konsep pembangunan nasional ini

Berkembangnya praktik perbankan syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991. di era reformasi perkembangan konsep perbankan syariah semakin menguat dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan membuka peluang bagi percepatan pertumbuhan dan berdirinya bank-bank dengan konsep syariah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 huruf m Undang-

Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa bank-bank konvensional diperbolehkan untuk mendirikan unit-unit syariah atau bahkan mengkonversi secara total menjadi bank syariah.

Sepanjang tahun 2005, perbankan syariah berkembang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan perbankan syariah yang hingga saat ini telah mencapai tiga Bank Umum Syariah (BUS), dan 19 unit usaha syariah (UUS) dengan jaringan 422 kantor cabang (KC) termasuk kantor kas dan 92 unit Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Asetnya tumbuh mencapai lebih dari Rp 20 triliun (tahun 2004 sebesar Rp 14 triliun). Meskipun dari sisi aset yang masih sangat kecil bila dibandingkan dengan seluruh aset perbankan nasional, pertumbuhan perbankan syariah kedepan dirasakan akan semakin kuat. Hal ini dipegaruhi oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya melalui pembentukan payung hukum perbankan syariah melalui Undang-Undang Perbankan Syariah, yang sampai saat ini sedang menjadi bahasan di DPR.

Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah khususnya Bank Indonesia turut mendukung perkembangan bank syariah di tanah air, seperti kebijakan mendorong bank-bank konvensional untuk melakukan *spin off* unit usaha syariah, pembentukan *office channeling*, dan yang lainnya. Bahkan pemerintah berencana mengalihkan pengelolaan seluruh tabungan haji dari Departemen Agama kepada bank syariah, tentunya hal ini akan semakin memperkuat permodalan perbankan syariah

Perkembangan perbankan dengan sistem syariah mulai bangkit di Indonesia setelah krisis ekonomi melanda Indonesia dan kawasan asia sekitar tahun 1997. pada saat krisis terjadi, sistem perbankan konvensional tidak berdaya karena terjadinya kenaikan suku bunga yang luar biasa tingginya sehingga berakibat nasabah sebagai debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya.

Hal ini pada akhirnya berakibat pada membengkaknya kredit bermasalah di perbankan Indonesia, sampai akhirnya pemerintah harus turun tangan memberikan talangan dana berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membantu perbankan agar tetap bisa bertahan dan tidak membuat perekonomian semakin memburuk. Di samping itu pemerintah juga membentuk (Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk membantu pemerintah memperbaiki kinerja perbankan nasional yang hancur akibat membengkaknya kredit bermasalah.

Akibat dari krisis, perbankan Indonesia yang diselenggarakan dengan sistem konvensional mengalami kehancuran dan memerlukan campur tangan pemerintah untuk penambahan modal. Fenomena perbankan tersebut mengakibatkan terjadinya *rush* besar-besaran sehingga banyak bank mengalami *building*. Hal ini merupakan puncak ketidakpercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, sehingga masyarakat mengambil dana secara besar-besaran, memindahkan dana dari bank yang lemah ke bank yang kuat, dan atau menggunakan dananya untuk membeli valuta asing. Akibatnya

sejumlah bank kesulitan likuiditas yang sangat besar dan beberapa diantaranya tidak memiliki lagi dana untuk melayani penarikan dana dari nasabahnya.

**Tabel 1.1**  
**16 BANK SWASTA NASIONAL YANG DILIKUIDASI**  
**(24 NOVEMBER 1997)**

**(Dalam Juta Rupiah)**

No	Nama Bank	Pemilik Mayoritas	Total Aset	Modal
1	Bank Harapan Sentosa	Hendra Raharja 38,80 %	4.291,625	3.341,177
2	Bank Guna Internasional	Hendra Raharja 33,34 %	448,88	59,213
3	Bank Andromeda	Prayogo Pangestu 50,0 %	1.383,377	115,168
4	Bank Astria Raya	Hendry Liem 35,0 %	715,767	55,168
5	Bank Sejahtera B. Umum	Pt. Ahad A. Asri 94,17 %	2.220,045	146,849
6	Bank Dwipa	Bambang Samijono 38,0 %	159,305	13,411
7	Bank Kosagraha Semesta	Setiawan Chandra 70,0 %	2.201,323	17,051
8	Bank Jakarta	H. Probosutedjo 87,0 %	2.296,822	30,482
9	Bank Citrahasta Manunggal	Sutoyo Sukarno 45,50 %	163,506	13,482
10	Southeast Asia Bank	Pt. Manggarai Permai 30,15 %	617,865	28,105
11	Bank Pinaesaan	F. H Eman 74,18 %	512,405	29,205
12	Bank Mataram Dhanarta	Hamengkubuwono X 95,0 %	305,626	15,912
13	Bank Anrico	H. Anwar Syukur 99,0 %	12,7730	5,580
14	Bank Fasific	Dr. Ibnu Sutowo Group 61,75 %	2.276,050	190,328
15	Bank Industri	Ydp Bri 60,0 %	543,901	30,636
16	Bank Majapahit Jaya	Forum37 Plus	176,001	22,841

Sumber : Bank Indonesia, dimuat dalam berbagai surat kabar.

**Tabel 1.2**  
**DAFTAR BANK SWASTA NASIONAL**  
**YANG DIAMBIL ALIH OLEH PEMERINTAH**  
**(MARET 1999)**

No	Nama Bank
1	Bank Duta
2	Bank Nusa Nasional
3	Bank Risjad Salim Internasional
4	Bank Tamara
5	Bank Pos Nusantara
6	Bank Jaya
7	Bank Rama

Sumber : Bank Indonesia, dimuat dalam berbagai surat kabar.

Pengalaman selama krisis ekonomi tersebut memberikan suatu pelajaran berharga bahwa prinsip *risk sharing* (berbagi resiko) dan *profit and loss sharing* (bagi hasil), sebagaimana terdapat pada sistem bank berdasarkan prinsip syariah, merupakan suatu prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perbankan syariah mempunyai resistensi yang lebih baik dibanding bank konvensional. Oleh karena itu perbankan syariah akan berkembang dengan *steady-growth* dari masa ke masa.

Namun demikian bank syariah dituntut untuk menjaga kesehatan keuangannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 30 April 1997. Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia itu dinyatakan bahwa tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia sebagai pengawas

dan Pembina bank, masing-masing pihak perlu meningkatkan diri dan bersama-sama berupaya untuk mewujudkan bank yang sehat.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Perbankan Syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode Tahun 2002-2005”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagai salah satu aspek kriteria penilaian terhadap industri perbankan, kesehatan keuangan perbankan mutlak diperhatikan. Pentingnya kesehatan keuangan suatu perbankan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank sebagai sebuah lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu rumusan sebagai berikut :

1. Mengetahui perkembangan kinerja keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
2. Mengetahui perkembangan tingkat kesehatan finansial pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode tahun 2002-2005
3. Faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap tingkat kesehatan finansial pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode tahun 2002-2005

### C. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan supaya tidak mengalami perluasan dalam pembahasan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Maka peneliti akan membatasi masalah pada penggunaan alat analisis dalam menilai kesehatan financial PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan *CAMEL Modified*, artinya dengan menghilangkan bobot manajemen sehingga menjadi *rasio capital* (permodalan), *assets* (kualitas aktiva produktif), *earning* (rentabilitas) dan *liquidity* (likuiditas).

### D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perkembangan kinerja keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode tahun 2002-2005.
2. Mengetahui perkembangan tingkat kesehatan finansial pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode tahun 2002-2005.
3. Mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kesehatan finansial pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi obyek penelitian

Dapat memberikan suatu bahan evaluasi dan kebijakan bagi manajemen yang berkaitan dengan kinerja finansial PT. BMI Tbk.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen perbankan.

3. Bagi pemerhati perbankan syariah

Dapat menjadikan wacana bagi para pemerhati perbankan syariah tentang kinerja keuangan sehingga diharapkan bisa mengembangkan dunia perbankan syariah.

4. Bagi pemerintah

Dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka perkembangan dunia perbankan, khususnya dalam pengambilan kebijakan di bidang perbankan syariah.

5. Bagi penulis

Merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk menemukan kesesuaian antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lokasi.

6. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bias menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dan mampu menyempurnakannya.